



PERATURAN KALURAHAN PENGKOK

NOMOR 8 TAHUN 2025

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN PENGKOK

TAHUN ANGGARAN 2026



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PATUK

KALURAHAN PENGKOK



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PATUK

PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK

ꦧꦶꦭꦶꦏꦏꦸꦫꦗꦏꦺꦤ꧀ꦤꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGKOK

DAN PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK

TERHADAP

PERATURAN KALURAHAN PENGKOK TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

KALURAHAN PENGKOK TAHUN ANGGARAN 2026


NOMOR : 8 TAHUN 2025

NOMOR : 8 TAHUN 2025

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, pada Musyawarah Bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Pengkok menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Pengkok Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Pengkok Tahun Anggaran 2026 tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Balai Kalurahan Pengkok dan ditandatangani bersama oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Pengkok dan Lurah Pengkok.

Ketua Bamuskal Pengkok

RIYANTO, S.Pd, M.M.

Lurah Pengkok

SUGIT



LURAH PENGKOK
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN PENGKOK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGKOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44):

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Desa Pengkok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan

Pengkok Tahun 2020 Nomor 5);

15. Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pengkok Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Pengkok Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Pengkok Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGKOK

dan

LURAH PENGKOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp. 1.924.625.300,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | Rp. 1.866.751.174,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. 57.874.126,00 |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 182.125.874,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 240.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. (57.874.126,00) |
| SILPA Tahun Berkenaan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pengkok.

Ditetapkan di Pengkok

pada tanggal 29 Desember 2025

LURAH PENGKOK,



Diundangkan di Pengkok
pada tanggal 29 Desember 2025
CARIK, PENGKOK,

DIAN HARYANTI

LEMBARAN KALURAHAN PENGKOK TAHUN 2025 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 28.850.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.893.775.300,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.924.625.300,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 710.064.330,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 644.784.078,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 443.330.910,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 68.571.856,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.866.751.174,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 57.874.126,00 | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 182.125.874,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 182.125.874,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 240.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 240.000.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | (57.874.126,00) | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 28.850.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.893.775.300,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.924.625.300,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>1.155.038.808,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 873.647.637,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 47.710.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 47.710.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 554.974.550,00 | ADD, PBH |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 554.974.550,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 46.332.000,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 46.332.000,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 101.823.607,00 | ADD, DLL, PBH, F |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 101.823.607,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 61.047.780,00 | ADD, PBH |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 61.047.780,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 3.635.000,00 | PBH |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.635.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 35.924.700,00 | ADD, PAD, PBH |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 35.924.700,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 22.200.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 22.200.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 152.986.000,00 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 22.386.000,00 | PAD, PBK, PBP |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.734.000,00 | |
| 1.2.02 | 5.3. | Belanja Modal | 6.652.000,00 | |
| 1.2.03 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 96.500.000,00 | DDS |
| 1.2.03 | 5.3. | Belanja Modal | 96.500.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.90 | | Pengadaan Peralatan Kerja | 26.700.000,00 | ADD, PAD, PBP |
| 1.2.90 | 5.3. | Belanja Modal | 26.700.000,00 | |
| 1.2.94 | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 2.600.000,00 | ADD |
| 1.2.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.600.000,00 | |
| 1.2.95 | | Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja | 4.800.000,00 | PBP |
| 1.2.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 23.480.000,00 | |
| 1.3.01 | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.770.000,00 | PBH |
| 1.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.770.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 14.910.000,00 | PBP |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.910.000,00 | |
| 1.3.90 | | Penyusunan Monografi Desa | 300.000,00 | PBH |
| 1.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 300.000,00 | |
| 1.3.91 | | Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin | 6.500.000,00 | DDS |
| 1.3.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 100.457.799,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 7.115.000,00 | ADD |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.115.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 1.215.000,00 | ADD |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.215.000,00 | |
| 1.4.05 | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 1.800.000,00 | PBH |
| 1.4.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.775.000,00 | ADD, PBP |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.775.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 73.966.000,00 | DDS, PBP |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 19.766.000,00 | |
| 1.4.08 | 5.3. | Belanja Modal | 54.200.000,00 | |
| 1.4.90 | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran | 14.586.799,00 | ADD, PAD |
| 1.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.586.799,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 4.467.372,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 2.017.372,00 | PAD |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.017.372,00 | |
| 1.5.94 | | Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB | 2.450.000,00 | PBH |
| 1.5.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.450.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>541.920.510,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 33.800.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 33.800.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 33.800.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 186.040.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 127.549.000,00 | DDS, PBP |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 127.549.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 3.110.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.110.000,00 | |
| 2.2.91 | | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | 3.000.000,00 | DDS |
| 2.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 2.2.94 | | Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD | 27.181.000,00 | DDS, PBP |
| 2.2.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.181.000,00 | |
| 2.2.98 | | Insentif kader kesehatan/KB | 25.200.000,00 | DDS |
| 2.2.98 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.200.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 260.478.910,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 260.478.910,00 | DDS |
| 2.3.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 259.278.910,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 20.467.600,00 | |
| 2.4.91 | | Pemberian stimulan jamban sehat | 20.467.600,00 | DDS |
| 2.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.467.600,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 11.134.000,00 | |
| 2.6.01 | | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 9.934.000,00 | DDS |
| 2.6.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.934.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.200.000,00 | PBP |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | |
| 2.8. | | Sub Bidang Pariwisata | 30.000.000,00 | |
| 2.8.02 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 30.000.000,00 | DDS |
| 2.8.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>59.875.000,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 19.490.000,00 | |
| 3.1.02 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes | 7.440.000,00 | PBH |
| 3.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.440.000,00 | |
| 3.1.04 | | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 3.900.000,00 | DDS |
| 3.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.900.000,00 | |
| 3.1.93 | | Pembinaan Jaga Warga | 8.150.000,00 | DDS |
| 3.1.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.150.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 11.600.000,00 | |
| 3.2.01 | | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 8.100.000,00 | DLL |
| 3.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.100.000,00 | |
| 3.2.92 | | Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa | 3.500.000,00 | PBH |
| 3.2.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 17.585.000,00 | |
| 3.3.90 | | Pelaksanaan peringatan hari besar nasional | 9.535.000,00 | PBH |
| 3.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.535.000,00 | |
| 3.3.93 | | Operasional Karang Taruna | 8.050.000,00 | PBH |
| 3.3.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.050.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 11.200.000,00 | |
| 3.4.91 | | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat | 4.800.000,00 | DDS |
| 3.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | |
| 3.4.92 | | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa) | 1.800.000,00 | DDS |
| 3.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | |
| 3.4.95 | | Operasional LPMD dan/atau LPMP | 2.100.000,00 | PBH |
| 3.4.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.100.000,00 | |
| 3.4.96 | | Operasional PKK | 2.500.000,00 | PBH |
| 3.4.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>41.345.000,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 24.000.000,00 | |
| 4.2.92 | | Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan | 24.000.000,00 | DDS |
| 4.2.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 12.020.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 9.010.000,00 | PBP |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.010.000,00 | |
| 4.3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 3.010.000,00 | PBP |
| 4.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.010.000,00 | |
| 4.5. | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 5.325.000,00 | |
| 4.5.01 | | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 5.325.000,00 | DDS |
| 4.5.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.325.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>68.571.856,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | DDS |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| 5.2. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 5.971.856,00 | |
| 5.2.00 | | Penanganan Keadaan Darurat | 5.971.856,00 | DDS |
| 5.2.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.971.856,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 57.600.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 57.600.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 57.600.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.866.751.174,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | 57.874.126,00 | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 182.125.874,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 240.000.000,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTO | (57.874.126,00) | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Pengkok, 29 December 2025



DAFTAR HADIR

Hari taggal : Rabu, 24 Desember 2025

Waktu : 10.00 – selesai

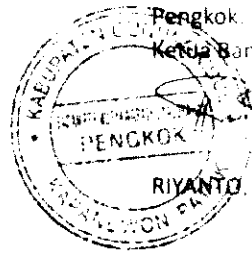
Agenda : Musyawarah Kalurahan Penetapan RAPBKal Tahun Anggaran 2026

| No | Nama | Unsur | Alamat | Tanda Tangan | |
|----|---------------------|------------|-------------|--------------|----|
| 1 | Winik Hiktawati | Bamuska1 | Pangatan | 1 | 2 |
| 2 | Helix D.W | Bambang | Pengok | | |
| 3 | Hidayah pyi teryani | Daratko | Pangatan | 3 | 4 |
| 4 | Budi Wahana | Dulaen | Kalinampa | | |
| 5 | MURYA | Dukuh | Pangatan | 5 | 6 |
| 6 | Sesanti | Bamuska1 | Ngrachan | | |
| 7 | Ilamit | Ulu | Sumbang | 7 | 8 |
| 8 | Agus P. | Bamuska1 | Nguter | | |
| 9 | Riyanto | Bamuska1 | Sumbang | 9 | 10 |
| 10 | Sigit Yumo | | | | |
| 11 | Sajip | Bamuska1 | Ngembes | 11 | 12 |
| 12 | Pohikoni | Bamuska1 | Pengok | | |
| 13 | Brif Winarto | Bamuska1 | Pangatan | 13 | 14 |
| 14 | WAHYO | | PANGATAN | | |
| 15 | Rondan H | | Pangatan DB | 15 | 16 |
| 16 | Tumiran | | Ngrachan | | |
| 17 | Mardi | | Ngrachan | 17 | 18 |
| 18 | Muji Yane | | Ngrachan | | |
| 19 | SUMINTO | Ngembes RT | Ngembes | 19 | 20 |
| 20 | Yanto | Pengkot RW | | | |
| 21 | Ahri | Ngembes RT | Ngembes | 21 | 22 |
| 22 | ngadi man | Sumbang | Sumbang | | |
| 23 | Gunungin | RT | Pengkot | 23 | 24 |
| 24 | Harjano | RW | Kalinampa | | |
| 25 | Rusdyan | RT | Pangatan | 25 | 26 |
| 26 | gusadi | RT | Kalinampa | | |
| 27 | Gimo | RT | --- | 27 | 28 |
| 28 | Purwati | RT | Pengkot | | |
| 29 | Sartini | RT | Pengkot | 29 | 30 |
| 30 | Eka Ismartani | RT | Pengkot | | |

| | | | | | |
|----|---------|----------|----------|----|----|
| 31 | Juana | PT | Ngemul | 31 | 32 |
| 32 | Isnan | Bamuskal | Panjara | 33 | 34 |
| 33 | Endi | Bukuh | Pengkot | 35 | 36 |
| 34 | Wawan | | Ngaram | 37 | 38 |
| 35 | Supriat | PT | Kalangan | 39 | 40 |
| 36 | Pipanta | Pamsta | Sumbang | | |
| 37 | M. Jaka | Kasim | Pante | | |
| 38 | Iwanta | PT | Panjara | | |
| 39 | Suan | Lurah | Sumbang | | |
| 40 | Pia | Cant | Panjara | | |

Pengkot, 24 Desember 2025

Ketua Bamuskal Pengkot



RIYANTO, S.Pd. M.M.